



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPELITBANG)**

2020

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan telah tersusun.

Laporan perbaikan LKIP ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Disamping itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan dilakukan berbagai penyempurnaan baik terhadap SDM maupun sistem ketatalaksanaan yang berlaku, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Akhir kata, Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh perangkat organisasi Bappelitbang guna semakin meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah untuk menuju **Batola Setara**.

Marabahan, Maret 2020

[Signature] Kepala Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala !

[Signature]

Ir. H. ZULKIPLI YADI NOOR, M.Sc

NIP. 19660705 199203 1 016

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sarasan strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Bappelitbang Tahun 2017-2022 (reviu kedua). Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Renstra.

Ringkasan kinerja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala yang dihasilkan pada tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut ;

Sasaran *Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikatornya :*

- 1. Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja, capaian kinerja Bappelitbang pada Tahun 2019 adalah 99,27 % (sangat baik).*
- 2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW. capaian kinerja Bappelitbang pada Tahun 2019 adalah 100 % (sangat baik).*

Evaluasi terhadap pencapaian dan permasalahan yang ditemui pada setiap indikator sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala ke depan, yaitu :

- 1. Kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat (penerapan perencanaan yang akan terintegrasi dengan penganggaran).*
- 2. Instrumen pengendalian (monitoring dan evaluasi) pembangunan yang belum memanfaatkan suatu aplikasi yang terpadu.*

Hasil evaluasi dan reviu yang disampaikan untuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini bernilai penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dalam perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

=====

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	2
1. Tugas Pokok	2
2. Fungsi	3
C. Struktur Organisasi	3
D. Isu Strategis	4
E. Landasan Hukum	5
F. Sistematika	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Perencanaan Strategis	7
1. Visi Misi	7
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator	8
B. Rencana Kinerja Tahunan	11
C. Perjanjian Kinerja 2019	12
D. Perencanaan Anggaran 2019	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja	14
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	15
C. Akuntabilitas Keuangan	42
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Idikator Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (setelah direviu)	9
Tabel 2.2 Matrix Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022	10
Tabel 2.3 Pembobotan Penilaian SAKIP	11
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Eselon II dan Perencanaan Anggaran (Kepala Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019)	12
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	14
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Tahun 2018	15
Tabel 3.3 Perbandingan IKU Bappelitbang Tahun 2019 yang lama dengan baru (setelah direviu)	16
Tabel 3.4 Hasil perhitungan realisasi indikator sasaran/IKU Bappelitbang Tahun 2019	18
Tabel 3.5 Perbandingan target dan realisasi Kinerja Bappelitbang Tahun 2017-2022	18
Tabel 3.6 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Bappelitbang Tahun 2019	19
Tabel 3.7 Capaian indikator sasaran 2	38
Tabel 3.8 Sasaran dan Indikator Kinerja Program serta Indikator Kinerja Kegiatan	39
Tabel 3.9 Sasaran dan Indikator Kinerja Program serta Indikator Kinerja Kegiatan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022	40
Tabel 3.10 Komposisi Belanja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019	42

Tabel 3.11	Pagu dan Realisasi Anggaran yang Terkait dengan Paencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019	43
Tabel 3.12	Efektivitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018	43
Tabel 3.13	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018	44

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala	4
Gambar 3.1 Gambar Kulit Buku RKPD Tahun 2020 dan Buku Perubahan RKPD Tahun 2019	20
Gambar 3.2 Buku Dokumen Hasil Kajian	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perencanaan Kinerja berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022, Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 serta Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 dan juga memperhatikan tujuan dan sasaran pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Barito Kuala menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKIP Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 yang dimaksudkan, sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dengan pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah daerah di Urusan Perencanaan sesuai dengan kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan memiliki :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polis Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.

2. Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Sosial budaya, ekonomi dan fisik prasarana serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b) Pelaksanaan pembinaan umum di bidang sosial budaya, ekonomi dan fisik prasarana serta penelitian dan pengembangan.
- c) Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- d) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Sosial budaya, ekonomi dan fisik prasarana serta penelitian dan pengembangan.

- e) Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang sosial budaya, ekonomi dan fisik prasarana serta penelitian dan pengembangan.

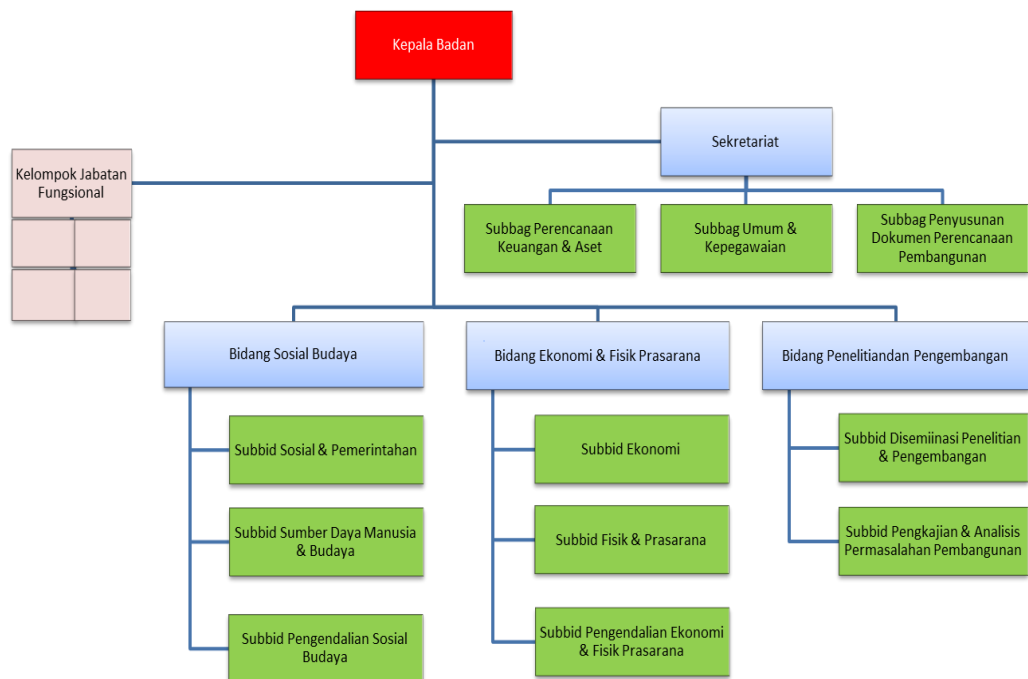
B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Bappelitbang sesuai Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset.
 3. Sub Bagian Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
- c. Bidang Sosial Budaya, yang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan.
 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Budaya.
 3. Sub Bidang Pengendalian Sosial Budaya.
- d. Bidang Ekonomi Fisik Prasarana, yang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ekonomi.
 2. Sub Bidang Fisik dan Prasarana.
 3. Sub Bidang Pengendalian Ekonomi dan Fisik Prasarana.
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang terdiri dari :
 1. Sub Bidang Diseminasi Penelitian dan Pengembangan.
 2. Sub Bidang Pengkajian dan Analisis Permasalahan Pembangunan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar. 1.1
Bagan Struktur Organisasi Bappelitbang Tahun 2019

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



C. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berkembang dan harus ditindaklanjuti dan menjadi bagian Tupoksi Bappelitbang dirumuskan sebagai berikut :

1. Penataan Tata Ruang yang harus terkendali sebagaimana amanat Perda Tata Ruang Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 tahun 2017.
2. Sumber Daya Manusia yang masih relative terbatas, masih perlu peningkatan secara kualitas dan kuantitas.
3. Kualitas Dokumen Perencanaan di semua SKPD yang perlu ditingkatkan.
4. Belum optimalnya koordinasi dan komitmen institusi perencana, penganggaran dan pelaksana mewujudkan perencanaan berkualitas.
5. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah.
6. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

7. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan. Sedangkan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan statistik yaitu:
 - a) Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik dalam pengolahan data.
 - b) Terdapat beberapa pihak penyedia data untuk data yang sama.
 - c) Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencanaan dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan.

D. Landasan Hukum

Pelaksanaan penyusunan LKIP Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (SAKIP) di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

E. Sistematika

Penyajian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan Gambaran Umum, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan Ringkasan Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu, IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan akuntabilitas kinerja yang meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2017–2022 adalah sebagai berikut : **“Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera”**, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu :

- a. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Perkotaan.
- b. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian.
- c. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumberdaya Manusia.
- d. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Terbuka dan Melayani.

Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022. Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 199.45/253/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala.

Penyusunan Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dengan

memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala .

Rencana Strategis Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022 pada perjalanannya sampai dengan Tahun 2019 mengalami perubahan karena setelah dilakukan reviu terhadap Renstra tersebut masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan, baik pada Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.

Selanjutnya, Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Inti bahasan dari Rencana Kerja ialah memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 (tahun lalu), kemudian hasil evaluasi menjadi dasar penentuan program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk Renja 2019, hal demikian juga berlaku untuk Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dicantumkan juga Visi dan Misi Bappelitbang selaku SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan. Sesuai Renstra Bappelitbang 2017-2022 Visi dan Misi adalah sebagai berikut :

- a. Visi Bappelitbang adalah “Terwujudnya Kabupaten Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera”.
- b. Misi Bappelitbang adalah “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel 2.1.

Tujuan Bappelitbang adalah *meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah* dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dari Unsur Perencanaan Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dari Unsur Perencanaan Kinerja

Sedangkan Sasaran Bappelitbang adalah *meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah*, dengan 2 (dua) indikator yaitu

- a. Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja.
- b. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW.

Tabel. 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikaltor Renstra
Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022 (setelah direviu).

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dari Unsur Perencanaan Kinerja..	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	1. Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja. 2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW.

Tabel. 2.2
MATRIKS INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN BARITO KUALA 2017 – 2022 (setelah direviu)

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dari Unsur Perencanaan Kinerja.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	1. Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja.	$\frac{\sum \text{Jumlah Keseluruhan TPK semua SKPD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Nilai Perencanaan Kinerja memiliki bobot 30 % dari total evaluasi dalam dokumen LKIP. Komponen penilaian perencanaan kinerja dievaluasi sesuai dokumen Renstra dan Renja yang harus sesuai dengan kaidah perencanaan. Hal ini merupakan Tupoksi Bappelitbang Apabila nilai Perencanaan Kinerja tinggi maka akan meningkatkan nilai SAKIP SKPD	Sekretariat, Bidang Sosial Budaya, Bidang Ekonomi Fisik Prasarana dan Bidang Litbang	Dokumen RPJMD, RKPD, Laporan Kerja Evaluasi dari Inspektorat dan Dokumen Hasil Kajian dan Litbang
			2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang sesuai dengan RTRW}}{\text{Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang}} \times 100\%$	Pemfaatan Ruang harus sesuai dan mengacu pada dokumen RTRW.		

Tabel 2.3
Pembobotan Penilaian SAKIP

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)
1.	Perencanaan kinerja	30
2.	Pengukuran kinerja	25
3.	Pelaporan kinerja	15
4.	Evaluasi Internal	10
5.	Capaian kinerja	20
	Jumlah	100

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), dan akan dilaksanakan oleh satuan kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan ada 3 hal yang harus dipenuhi yaitu sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Rencana Kinerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 disajikan dalam lampiran 2.

Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja tahunan ini adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra yang akan dicapai pada tahun 2018 oleh Badan Perencana Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Setiap sasaran dapat memiliki lebih dari satu indikator kinerja dan secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan, indikator kinerja dapat berupa output maupun outcomes.

Target merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai.

C. Perjanjian Kinerja 2019.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh SKPD akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan, SKPD akan lebih baik dimana akan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 yang telah direviu, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019.

D. Perencanaan Anggaran.

Dari 2 (dua) indikator sasaran dengan yang diperjanjikan didukung oleh 6 (enam) program utama yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar **Rp 3.348.774.400,00** rincian seperti tabel dibawah.

Tabel : 2.4

Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Eselon II dan Perencanaan Anggaran
(Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala)
Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target %	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	1. Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja.	persen	23,30	1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	740.927.200,00
				2. Program Perencanaan Pembangunan	561.525.000,00

				Ekonomi	
				3. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya	586.798.400,00
				4. Program Kajian Dan Penelitian	306.444.000,00
				5. Program Penguatan Kelembagaan Penelitian Dan Pengembangan	125.939.000,00
				6. Program Perencanaan Fisik Prasarana	298.916.300,00
	2. Persentase Kesesuaian Pemanfaat- an Ruang Dengan RTRW.	Persen- tase	100	7. Program Perencanaan Fisik Prasarana	728.224.500,00
JUMLAH					3.348.774.400,00
Program Pendukung (Program Kegiatan yang ada pada setiap SKPD)					
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					511.024.200,00
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur					913.211.800,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					39.000.000,00
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan					111.891.000,00
JUMLAH					1.575.127.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak/pemberi amanah yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala telah melakukan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah disepakati dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 yang telah dilakukan perbaikan, penilaian telah dilakukan oleh Tim Penyusunan Laporan Kinerja. Mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, hasil pengumpulan data selanjutnya dibuat kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1. Skala nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval nilai realisasi kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka Bappelitbang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukuran untuk menilai keberhasilan/kegagalan dalam menjalankan amanah pimpinan. Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 (setelah direviu)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria-Kode
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja.	%	23,30	23,13	99,27	Sangat Baik
		2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.	%	100	100	100 %	Sangat Baik
	Jumlah			123,30	123,13	199,27	
	Jumlah Rata-Rata					99,64	Sangat Baik

Dari tabel di atas capaian masing-masing Indikator Kinerja Utama Bappelitbang 99,27 % dan 100 %, kemudian penentuan **Interval Kinerja** dan **Kriteria Kinerja** atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 adalah termasuk di Level 1 ($91 \leq 100$) dengan kriteria **Sangat Baik** (Kode Warna Hijau Tua).

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Tahun 2019 adalah tahun kedua dalam perencanaan jangka menengah/Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala. Pada tahun ini Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala melakukan perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja, perubahan tersebut dilakukan untuk ;

- Sebagai langkah untuk peningkatan kinerja dalam mendukung pencapaian kualitas dokumen perencanaan daerah.
- Urusan Tata Ruang (dalam proses) yang akan diserahkan ke Dinas PUPR sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019/47 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sehingga penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan/Kecamatan (RDTRK) lebih komprehensif.

Tabel. 3.3. Perbandingan IKU Tahun 2019 yang lama dengan baru
(setelah direviu)

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
	Lama	Baru	Lama	Baru
1	Terwujudnya Perencanaan Daerah Yang Berkualitas.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Yang Direalisasikan.	Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja.
			Persentase Diseminasi Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan Dalam Dokumen Perencanaan.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW.
2	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Tata Ruang.	-	Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW.	-

Sesuai ketentuan bahwa Pelaporan Kinerja disusun mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama serta Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbang. Renstra awal Bappelitbang berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/253/KUM/2018 Tanggal 4 Juni 2018

Tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala. Kemudian untuk Renstra Bappelitbang terakhir dilakukan reviu, dengan ketentuan bahwa menetapkan menjadi 1 (satu) Sasaran Strategis dari sebelumnya 2 (dua) sasaran strategis, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dari sebelumnya 3 (tiga) Indikator Kinerja, seperti pada Tabel 3.3. diatas.

Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” merupakan pengimplementasian pencapaian Misi Keempat RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”.

Untuk upaya pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah” Bappelitbang menetapkan 2 (dua) buah indikator kinerja, yaitu ; **“Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja”** dan **“Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW”**, dirinci satu per satu sebagai berikut :

- 1) **Indikator Kinerja 1** “Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja.”. Indikator ini diarahkan untuk menghitung jumlah nilai rata-rata hasil/capaian kinerja SKPD lingkup Kabupaten Barito Kuala dari unsur **Perencanaan Kinerja**. Data diambil dari Kertas Kerja Evaluasi AKIP hasil perhitungan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Barito Kuala yang akan dievaluasi pada tahun 2019. Adapun perhitungan/formulasi dari indikator ini adalah sebagai berikut ;

$$= \frac{\Sigma \text{Jumlah Keseluruhan TPK semua SKPD.}}{\Sigma \text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$$

Ket : TPK = nilai “Total Perencanaan Kinerja”

Tabel 3.4. Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Sasaran/IKU Bappelitbang Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran 1	Target %	Realisasi (%)	%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja.	23,30	23,13	99,27

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis Bappelitbang 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Bappelitbang 2017-2022

Indikator Sasaran 1	Awal Renstra	2019			Target akhir renstra	Capaian s/d 2019 terhadap (2022)
		Target	Realisasi	% Realisasi		
Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja..	22,50	23,30	23,13	99,27	24,00 %	99,27

2. Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target IKU.

Penyebab tidak tercapainya target indikator “Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja” adalah bahwa ada SKPD yang tidak menyelesaikan dokumen perencanaan sesuai dengan out line yang ditetapkan.

3. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk pencapaian IKU.

Untuk mendukung pencapaian target “Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja” dialokasikan dana dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappelitbang Tahun Anggaran 2019

sebesar **Rp 3.348.774.400,00** dan terealisasi **Rp 3.089.157.954,00** sehingga terdapat efisiensi sebesar 7,75 %

Tabel. 3.6. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Bappelitbang Tahun Anggaran 2019

Sasaran Strategis	Indikator sasaran 1	% Capaian kinerja (≥ 100)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi %
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja.	99,27	92,25	7,75

4. Program/Kegiatan yang menunjang untuk pencapaian kinerja sasaran

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis "Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah." dengan indikator "Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja kinerja" yang dituangkan dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan dengan indikator masing-masing sebagai berikut :

- a) Sasaran Program 1 "Meningkatnya kualitas dokumen RKPD", dengan mengambil sebuah Indikator Kinerja (IK) Program 1, yaitu "Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati". Sasaran program ini berkontribusi erat pada pencapaian Sasaran Renstra "Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah".

Rumusan menghitung indikator ini adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Dokumen RKPD yang disusun.}} \times 100\%$$

Target Indikator Kinerja Program **“Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati”** pada tahun 2019 adalah 100 %. Dimana dari 2 Dokumen RKPD yang disusun adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 dan RKPD Perubahan 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 26 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 30 Tahun 2019. Sehingga capaian dari Indikator kinerja Program 1 diatas pada tahun 2019 adalah 100 %.

Program untuk mencapai target indikator diatas adalah **Program Perencanaan Pembangunan Daerah.**

Gambar. 3.1. Buku RKPD Tahun 2020 dan Perubahan RKPD 2019

	
1. RKPD Tahun 2020	2. Perubahan RKPD 2019

- b. Sasaran Program 2 “Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya”, dengan menentukan satu indikator yaitu “Nilai SAKIP SKPD Sosbud yang dicapai dari unsur perencanaan kinerja”. Sasaran Program tersebut juga akan

berkontribusi pada pencapaian Sasaran Renstra “Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”.

Rumusan menghitung indikator ini adalah :

$$= \frac{\sum \text{Jumlah Keseluruhan TPK semua SKPD bidang Sosbud.}}{\sum \text{Jumlah SKPD bidang sosbud}} \times 100\%$$

Target Indikator Kinerja Program “Nilai SAKIP SKPD Sosbud yang dicapai dari unsur perencanaan kinerja” ditargetkan sebesar 23,30 % dari rata-rata nilai TPK SKPD Bidang Sosbud. Tahun 2019 telah terealisasi 23,13 % dari 33 SKPD, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Program 2 diatas pada tahun 2019 adalah 99,27 %.

Program untuk mencapaikan target indikator diatas adalah **Program Perencanaan Sosial dan Budaya.**

- c) Sasaran Program 3 “Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan bidang Ekonomi Fisik Prasarana” dengan mengambil satu indikator kinerja, yaitu “Nilai SAKIP SKPD Bidang Ekonomi Fisik dan Prasarana yang dicapai dari unsur perencanaan kinerja”, indikator sasaran Program juga akan berkontribusi pada pencapaian Sasaran Renstra **“Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah”.**

Rumusan menghitung indikator ini adalah :

$$= \frac{\sum \text{Jumlah Keseluruhan TPK semua SKPD bidang Ekofispra.}}{\sum \text{Jumlah SKPD bidang ekofispra}} \times 100\%$$

Ket : Ekofispra = Ekonomi Fisik Prasarana

Target Indikator Kinerja Program **"Nilai SAKIP SKPD Ekofispra yang dicapai dari unsur perencanaan kinerja"** ditargetkan sebesar 23,30 % dari rata-rata nilai TPK SKPD Bidang Ekofispra. Tahun 2019 telah terealisasi 23,13 % dari 14 SKPD, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Program diatas pada Tahun 2019 adalah 99,27 %.

Program untuk mencapaikan target indikator diatas adalah :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.
- 2) Program Perencanaan Fisik Dan Prasarana

d) Sasaran Program **"Meningkatnya kajian kelitbangan"**, dengan mengambil satu Indikator Kinerja Program "Persentase Hasil Kajian Yang Implementasikan", indikator sasaran program ini juga akan berkontribusi pada pencapaian Sasaran Renstra **"Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah"**.

Rumusan menghitung indikator ini adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen Hasil kajian kelitbangan yang Diimplementasikan}}{\text{Jumlah Dokumen hasil kajian kelitbangan yang Disusun}} \times 100\%$$

Target Indikator Kinerja Program **"Persentase hasil kajian yang implementasikan"** sebesar 100 % atau 2 (dua) Dokumen Hasil Penelitian. Tahun 2019 telah terealisasi sebanyak 2 (dua) Dokumen Hasil Penelitian, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Program 4 diatas pada tahun 2019 adalah 100 %. Dua Dokumen Hasil Penelitian dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Penjabaran Konsep Menata Kota di Kabupaten Barito Kuala
- 2) Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barito Kuala

Gambar. 3.2. Dokumen hasil kajian yang diimplementasikan

	
1. Penjabaran Konsep Menata Kota di Kabupaten Barito Kuala	2. Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barito Kuala

Program untuk mencapai target indikator diatas adalah *Program Kajian dan Penelitian dan Program Penguatan Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan.*

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan Indikator Kinerja Program maka dilaksanakan lah beberapa Kegiatan dengan Indikator Kinerja Kegiatan masing-masing adalah ini :

a) Indikator Kinerja Kegiatan “ Jumlah dokumen RKPD yang disusun”.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan penyusunan Dokumen RKPD adalah berjumlah 5 dokumen, yaitu :

- 1) Rancangan Awal RKPD 2020
- 2) Draft Rancangan Awal RKPD 2021
- 3) Rancangan Akhir RKPD 2020
- 4) RKPD Tahun 2020,
- 5) RKPD Perubahan Tahun 2019,

Target Indikator Kinerja Kegiatan **“Jumlah dokumen RKPD yang disusun”** sebesar 100 % atau 5 Dokumen. Tahun 2019 telah terealisasi sebesar 5 Dokumen, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan adalah 100 %.

Dalam menyusun 5 dokumen tersebut didasarkan pada rangkaian proses perencanaan dibawah ini yaitu :

- 1) Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2020, yang dilaksanakan pada Tanggal 4 Februari 2019, yang dibuka oleh Bupati Barito Kuala yang dihadiri oleh seluruh stakeholder perencanaan lingkup pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Hasil kegiatan ini diperoleh Berita Acara Konsultasi Publik dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2020.
- 2) Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 12 Februari 2019 di 17 kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Musrenbang kecamatan dilaksanakan oleh SKPD kecamatan dan dihadiri oleh anggota DPDR (sesuai Daerah Pemilihan), SKPD lingkup Kabupaten Barito Kuala, Unsur Kecamatan, Kepala desa beserta delegasi desa. Hasil kegiatan ini diperoleh Berita Acara Usulan Rencana Prioritas Kecamatan sebagai bahan Forum SKPD.
- 3) Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan, yang dilaksanakan oleh Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri di Balikpapan pada tanggal 11 Maret 2019. Kemudian tri lateral desk pada tanggal 12-15 Maret 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh SKPD lingkup

Kabupaten Barito Kuala yang memiliki usulan APBN. Hasil kegiatan ini berupa Daftar Usulan program kegiatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 yang akan didanai APBN.

- 4) Forum SKPD, yang dilaksanakan di SKPD lingkup Kabupaten Barito Kuala, pada tanggal 4 s/d 7 Maret 2019. Kegiatan dihadiri oleh unsur SKPD masing-masing beserta stakeholdernya dan utusan Bappelitbang. Hasil kegiatan ini berupa Berita Acara Sinkronisasi Program Kegiatan
- 5) Musrenbang Kabupaten, yang dilaksanakan oleh Bappelitbang pada tanggal 1-2 April 2019. Acara ini dibuka oleh Bupati dan dihadiri oleh seluruh stakeholder perencanaan SKPD, Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, pimpinan dan anggota DPRD, delegasi/utusan kecamatan, tokoh-tokoh masyarakat. Hasil dari kegiatan ini berupa Berita Acara Program Kegiatan Prioritas Tahun 2020, untuk bahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020.
- 6) Forum Gabungan SKPD, yang dilaksanakan bersamaan dengan Musrenbang kabupaten pada 1-2 April 2019. , dihadiri oleh seluruh stakeholder perencanaan/SKPD, anggota DPRD dari komisi terkait dan delegasi/utusan kecamatan. Hasil dari acara ini berupa Berita Acara Daftar Usulan Prioritas Tahun 2020 yang telah terkonfirmasi dan untuk bahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2020.
- 7) Musrenbang Provinsi, yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan di Bappeda pada tanggal 9 April 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh stakeholder perencanaan/SKPD provinsi, anggota DPRD dan DPR RI

dan DPD Dapil Kalsel, SKPD Kabupaten Barito Kuala yang memiliki usulan APBD Provinsi dan APBN. Hasil kegiatan ini adalah Daftar Usulan program kegiatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 yang akan didanai APBD Provinsi dan APBN dan juga sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun 2020 dan RKPD perubahan Tahun 2019.

- 8) Forum Gabungan (trilateral desk), yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada tanggal 10-12 April 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh stakeholder perencanaan/SKPD provinsi, SKPD Kabupaten Barito Kuala yang memiliki usulan APBD Provinsi dan APBN. Hasil kegiatan ini adalah Daftar Usulan Prioritas program kegiatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan sumber dana APBD Provinsi dan APBN yang akan dituangkan ke RKPD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2020 dan bahan Musrenbang Nasional, dan juga sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun 2020 dan RKPD perubahan Tahun 2019.
- 9) Musrenbang Nasional, yang dilaksanakan oleh Beppenas di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2019 pembukaan, dan Tri lateral desk 10-14 Mei 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh stakeholder perencana di pusat, utusan Bappeda Provinsi Kalsel, perwakilan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala. Hasil kegiatan ini adalah Daftar Usulan Prioritas program kegiatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan sumber dana APBN yang akan dituangkan ke RKP Nasional Tahun Anggaran 2020, dan juga sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun 2020 dan RKPD perubahan Tahun 2019.

- 10) Rapat Koordinasi Regional, yang dilaksanakan oleh Beppen as di Balikpapan pada tanggal 20-21 Agustus 2019. Kegiatan ini dihadiri oleh SKPD lingkup Kabupaten Barito Kuala yang memiliki usulan APBN. Hasil kegiatan ini berupa Daftar Usulan program kegiatan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan dana APBN yang akan ditindaklanjuti sebagai bahan Musrenbang Nasional, dan juga sebagai bahan penyusunan RKPD Tahun 2020 dan RKPD perubahan Tahun 2019.

Untuk mencapai Indikator Kinerja diatas dilaksanakan kegiatan sbb :

- 1) Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD, dengan jumlah anggaran Rp 203.245.000,00.
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD, jumlah anggaran Rp 339.900.000,00.
- 3) Kegiatan Penetapan RKPD, anggaran Rp 197.782.200,00.

b) Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Sosial Dan Pemerintahan yang selaras”.

Untuk mencapai target indikator ini dilaksanakan kegiatan dibawah ini :

- 1) Asistensi Renstra/Renja SKPD
- 2) Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD
- 3) Asistensi Anggaran SKPD
- 4) Koordinasi pelaksanaan pencapaian target Renstra/Renja, baik dilingkup kabupaten, provinsi maupun nasional
- 5) Konsultasi kebijakan terkait pencapaian target Renstra/Renja yang melibatkan anggaran provinsi maupun nasional.

SKPD mitra Sosial dan Pemerintahan **kelompok pertama** terdiri dari SKPD :

- 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja
- 3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 5) Sekretariat Daerah
- 6) Sekretariat DPRD
- 7) Kecamatan Tabunganen
- 8) Kecamatan Tamban
- 9) Kecamatan Mekarsari
- 10) Kecamatan Anjir Pasar
- 11) Kecamatan Anjir Muara
- 12) Kecamatan Alalak
- 13) Kecamatan Mandastana
- 14) Kecamatan Belawang
- 15) Kecamatan Wanaraya
- 16) Kecamatan Barambai
- 17) Kecamatan Rantau Bedauh
- 18) Kecamatan Cerbon
- 19) Kecamatan Bakumpai
- 20) Kecamatan Marabahan
- 21) Kecamatan Tabukan
- 22) Kecamatan Kuripan
- 23) Kecamatan Jejangkit
- 24) Inspektorat

Target Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Renstra/Renja sub bidang sosial dan pemerintahan yang selaras” untuk **kelompok pertama** sebesar 100 % atau 24 Dokumen Renstra/Renja. Rerealisasi asistensi/sinkonisasi Renstra/Renja

dari 24 SKPD mitra sosial dan pemerintahan adalah 24 Dokumen Renstra/Renja, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan ini adalah 100 %.

Kegiatan asistensi Renstra/Renja SKPD Sub Bidang Sosial Pemerintahan dilaksanakan melalui **Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, dengan anggaran Rp 138.349.000,00**

Asistensi Renstra/Renja SKPD Sosial dan Pemerintahan **kelompok Kedua** terdiri dari SKPD :

- 1) Dinas Sosial
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Target Indikator Kinerja Kegiatan **“Jumlah dokumen Renstra/Renja SKPD Sub Bidang Sosial Dan Pemerintahan yang selaras”** untuk kelompok kedua sebesar 100 % atau 2 Dokumen Renstra/Renja. Tahun 2019 telah terealisasi sebesar 2 Dokumen Renstra/Renja, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan diatas adalah 100 %.

Kegiatan asistensi Renstra/Renja SKPD Sub Bidang Sosial Pemerintahan untuk kelompok kedua dilaksanakan melalui Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Di Tahun 2020 kedua kegiatan tersebut digabung menjadi satu dengan nama Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan. Hal dimaksud merupakan konsistensi adanya perubahan struktur organisasi sesuai Perbup Nomor 74 Tahun 2019.

c) Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen Renstra/Renja SKPD Sub Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Budaya yang selaras”.

Untuk mencapai target indikator ini dilaksanakan kegiatan dibawah ini :

- 1) Asistensi Renstra/Renja SKPD
- 2) Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD
- 3) Asistensi Anggaran SKPD
- 4) Koordinasi pelaksanaan pencapaian target Renstra/Renja, baik dilingkup kabupaten, provinsi maupun nasional
- 5) Konsultasi kebijakan terkait pencapaian target Renstra/Renja yang melibatkan anggaran provinsi maupun nasional.

Asistensi dan sinkronisasi Renstra/Renja SKPD **Sub Bidang SDM dan Budaya** dilaksanakan pada SKPD kelompok pertama terdiri dari SKPD :

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 3) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Target Indikator Kinerja Kegiatan **"Jumlah Dokumen Renstra/Renja SKPD sub bidang SDM dan Budaya yang selaras"** untuk kelompok pertama sebesar 100 % atau 3 Dokumen Renstra/Renja. Tahun 2019 telah terealisasi sebesar 3 Dokumen Renstra/Renja, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan diatas adalah 100 %.

Kegiatan asistensi Renstra/Renja SKPD Urusan SDM dan Budaya untuk kelompok pertama dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, dengan anggaran Rp 70.934.400,00.

Asistensi Renstra/Renja SKPD **Sub Bidang SDM dan Budaya** SKPD kelompok kedua terdiri dari:

- 1) Dinas Kesehatan,
- 2) RSUD H.Abdul Aziz

3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya Dan Pariwisata

Target Indikator Kinerja Kegiatan **"Jumlah Dokumen Renstra/Renja SKPD sub bidang SDM dan Budaya yang selaras"** untuk kelompok kedua sebesar 100 % atau 4 Dokumen Renstra/Renja. Tahun 2019 telah terealisasi sebesar 4 Dokumen Renstra/Renja, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan tersebut adalah 100 %.

Kegiatan asistensi Renstra/Renja SKPD Urusan SDM dan Budaya untuk kelompok kedua dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan, anggaran Rp 78.999.000,00
- 2) Kegiatan Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia, anggaran Rp 67.466.500,00

Di tahun 2020 kegiatan (nomor 1 s/d 2) masih dilaksanakan oleh Bidang Sosial Budaya, namun akan digabung menjadi satu kegiatan saja dengan nama **Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang SDM.**

d) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah SKPD Bidang Sosbud dengan capaian kinerja sesuai target".

Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Bidang Sosial Budaya dengan sasaran memantau pelaksanaan dan capaian kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 untuk semua mitra SKPD Bidang Sosial Budaya yaitu :

- 1) Dinas Pendidikan
- 2) RSUD H.Abdul Aziz
- 3) Dinas Kesehatan
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja

- 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 7) Dinas Sosial
- 8) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 9) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 11) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya Dan Pariwisata
- 12) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 13) Sekretariat Daerah
- 14) Sekretariat DPRD
- 15) Kecamatan Tabunganen
- 16) Kecamatan Tamban
- 17) Kecamatan Mekarsari
- 18) Kecamatan Anjir Pasar
- 19) Kecamatan Anjir Muara
- 20) Kecamatan Alalak
- 21) Kecamatan Mandastana
- 22) Kecamatan Belawang
- 23) Kecamatan Wanaraya
- 24) Kecamatan Barambai
- 25) Kecamatan Rantau Bedauh
- 26) Kecamatan Cerbon
- 27) Kecamatan Bakumpai
- 28) Kecamatan Marabahan
- 29) Kecamatan Tabukan
- 30) Kecamatan Kuripan
- 31) Kecamatan Jejangkit
- 32) Inspektorat
- 33) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Target Indikator Kinerja Kegiatan “ **Jumlah SKPD bidang Sosbud dengan capaian kinerja sesuai target**” sebesar 100 % atau 1 Judul/Dokumen. Tahun 2019 telah terealisasi sebanyak 1 Judul/Dokumen, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan adalah 100 %. Pemantauan, monitoring evaluasi dan pelaporan terlaksana dengan **Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan**, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 108.155.500,00.

Di tahun 2020 Kegiatan diatas akan dipindahkan ke Bidang Pengendalian dan Litbang sesuai SOTK Bappelitbang Berdasarkan Perbup Nomor 47 tahun 2019.

e) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen Renstra/Renja Sub Bidang Ekonomi yang Selaras”.

Untuk mencapai target indikator ini dilaksanakan kegiatan dibawah ini :

- 1) Asistensi Renstra/Renja SKPD
- 2) Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD
- 3) Asistensi Anggaran SKPD
- 4) Koordinasi pelaksanaan pencapaian target Renstra/Renja, baik dilingkup kabupaten, provinsi maupun nasional
- 5) Konsultasi kebijakan terkait pencapaian target Renstra/Renja yang melibatkan anggaran provinsi maupun nasional.

Asistensi dan sinkronisasi Renstra/Renja Sub Bidang Ekonomi yang terdiri dari SKPD :

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 3) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
- 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5) Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
- 6) Dinas Perkebunan dan Peternakan

- 7) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
- 8) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 9) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Target Indikator Kinerja Kegiatan **“Jumlah Dokumen Renstra/Renja Sub Bidang Ekonomi yang selaras”**

sebesar 100 % atau 9 Dokumen Renstra/Renja. Tahun 2019 telah terealisasi sebesar 9 Dokumen Renstra/Renja, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan diatas adalah 100 %.

Kegiatan asistensi Renstra/Renja SKPD Sub Bidang Ekonomi didukung dengan kegiatan :

- 1) Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, anggaran sebesar Rp 149.894.500,00
- 2) Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (IPDMIP), anggaran sebesar Rp 228.250.000,00.

Di tahun 2020 kegiatan tersebut **tetap sama**.

f) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen RENSTRA/RENJA Sub Bidang Fisik Prasarana yang Selaras”.

Untuk mencapai target indikator ini dilaksanakan kegiatan dibawah ini :

- 1) Asistensi Renstra/Renja SKPD
- 2) Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD
- 3) Asistensi Anggaran SKPD
- 4) Koordinasi pelaksanaan pencapaian target Renstra/Renja, baik dilingkup kabupaten, provinsi maupun nasional
- 5) Konsultasi kebijakan terkait pencapaian target Renstra/Renja yang melibatkan anggaran provinsi maupun nasional.

Asistensi dan sinkronisasi Renstra/Renja SKPD Sub Bidang Fisik Prasarana kepada SKPD :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
- 3) Dinas Lingkungan Hidup
- 4) Dinas Perhubungan
- 5) Dinas Komunikasi dan Informatika

Target Indikator Kinerja Kegiatan **“Jumlah Dokumen Renstra/Renja Sub Bidang Fisik Prasarana yang selaras”** sebesar 100 % atau 5 Dokumen Renstra/Renja. Tahun 2019 telah terealisasi sebesar 5 Dokumen Renstra/Renja, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan adalah 100 %. Kegiatan asistensi Renstra/Renja SKPD Sub Bidang Fisik Prasarana didukung oleh Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana dengan Anggaran Rp 173.553.500,00.

g) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah SKPD bidang ekofispra dengan capaian kinerja sesuai target”.

Penyusunan Laporan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Bidang Ekonomi dengan sasaran memantau pelaksanaan dan capaian kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019 untuk semua mitra SKPD Urusan Ekonomi yaitu :

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 3) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
- 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 5) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura
- 6) Dinas Perkebunan dan Peternakan
- 7) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

8) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

9) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Target Indikator Kinerja Kegiatan **"Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Bidang Ekonomi"** sebesar 100 % atau 1 Judul/Dokumen. Tahun 2019 telah terealisasi sebanyak 1 Judul/Dokumen, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan diatas adalah 100 %.

Kegiatan pemantauan tersebut dilaksanakan dengan didukung kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Bidang Ekonomi), dengan anggaran Rp 183.380.500,00

di tahun 2020 kegiatan tersebut akan menjadi **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Ekonomi Fisik dan Prasarana** yang akan dilaksanakan oleh bidang Pengendalian dan Litbang Sesuai dengan Perbub SOTK Nomor 47 Tahun 2019.

h) Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah SKPD Bidang Ekofispra dengan capaian kinerja sesuai target".

Penyusunan laporan monitoring evaluasi Bidang Fisik Prasarana untuk memantau pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ada pada SKPD :

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 3) Dinas Lingkungan Hidup
- 4) Dinas Perhubungan
- 5) Dinas Komunikasi dan Informatika.

Target Indikator Kinerja Kegiatan **"Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Bidang Fisik Prasarana"** sebesar 100 % atau 1 Judul/Dokumen. Tahun 2019 telah terealisasi sebanyak 1 Judul/Dokumen, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan tersebut adalah 100 %.

Kegiatan pemantauan tersebut dilaksanakan dengan didukung kegiatan **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan** (Bidang Fisik Prasarana), dengan anggaran Rp 125.362.800,00

Pada tahun 2020 kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh bidang Pengendalian dan Litbang Sesuai dengan Perbub SOTK Nomor 47 Tahun 2019.

i) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah kajian yang disusun".

Untuk mencapai indikator kinerja "**Jumlah kajian yang disusun**" didukung dengan kegiatan **Identifikasi permasalahan pembangunan**, anggaran Rp 306.444.000,00.

Target Indikator Kinerja Kegiatan "**Jumlah kajian yang disusun**" sebesar 100 % atau 2 Dokumen. Pada akhir Tahun 2019 telah terealisasi sebanyak 2 Dokumen, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan tersebut adalah 100 %. Adapun Judul dokumen hasil penelitian tersebut adalah :

- 1) Penjabaran Konsep Menata Kota di Kabupaten Barito Kuala
- 2) Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala

j) Capaian Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah kajian yang diseminasikan".

Dalam mencapai indikator kinerja "**Jumlah kajian yang diseminasikan**" didukung dengan kegiatan :

- 1) Pengembangan dan Diseminasi bidang Ekonomi Fisik Prasarana dan Sosial Budaya, anggaran Rp 91.070.000,00.
- 2) Koordinasi Kerjasama Litbang Daerah dengan anggaran sebesar Rp 34.869.000,00.

Target Indikator Kinerja Kegiatan "**Jumlah kajian yang diseminasikan**" sebesar 100 % atau 3 Laporan. Tahun 2019

telah terealisasi sebanyak 3 Laporan, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan tersebut adalah 100 %.

- 2) Indikator kinerja 2, yaitu "Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW". Indikator ini dimaksudkan untuk memantau dan mengendalikan setiap kegiatan yang terkait langsung dengan pemakaian/penggunaan lahan/ruang agar selalu berpedoman pada aturan yang tertuang dalam dokumen RTRW Kabupaten Barito Kuala.

Perhitungan/formulasi dari indikator ini adalah sebagai berikut ;

$$= \frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Sesuai dengan RTRW}}{\text{Jumlah Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang}} \times 100\%$$

Capaian sasaran dengan indikator tersebut pada tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.7. Capaian indikator sasaran 2

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran 2	Target (%)	Realisasi (%)	%
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW.	100	100	100

Tabel 3.8. Sasaran dan Indikator Kinerja Program serta Indikator Kinerja Kegiatan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Nama Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW.	1. Persentase Penerbitan Rekomendasi Tata Ruang.	1. Jumlah Rekomendasi Tata Ruang	1. Revisi Rencana Tata Ruang

Dari tabel di atas bahwa untuk Indikator Sasaran 2 “Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW” didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Perencanaan Fisik dan Prasarana, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang. Indikator Program “Persentase penerbitan rekomendasi tata ruang” adalah indikator dari sasaran Program **“Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Bidang Ekofispra”**

Berdasarkan rencana kinerja sampai dengan tahun 2019 indikator kinerja Program **“Persentase penerbitan rekomendasi tata ruang”** ditargetkan sebesar 100 persen. Tahun 2019 indikator kinerja Program “Persentase penerbitan rekomendasi tata ruang” telah terealisasi 100 persen. Untuk mewujudkan Indikator Kinerja Program maka dilaksanakan Kegiatan dengan Indikator dibawah ini :

a) Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Rekomendasi Tata Ruang”.

Jumlah Rekomendasi Tata Ruang adalah didasarkan atas permohonan kesesuaian tata ruang dari masyarakat baik individu ataupun perusahaan. Permohonan kesesuaian tata ruang dapat diklasifikasi pada 2 (dua) kelompok, yaitu :

- 1) Permohonan Kesesuaian Tata Ruang untuk Perumahan dan Industri (60 Rekomendasi)
- 2) Permohonan Kesesuaian Tata Ruang untuk SHM Tanah (35 Rekomendasi)

Target Indikator Kinerja Kegiatan “**Jumlah Rekomendasi Tata Ruang**” sejumlah 95 Rekomendasi. Tahun 2019 telah terealisasi sebesar 95 Rekomendasi, sehingga capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan diatas adalah 100 %.

Dalam mencapai indikator kinerja dilaksanakan dengan dukungan kegiatan Revisi rencana tata ruang, anggaran Rp 728.224.500,00

Urusan Tata Ruang (dalam proses) yang akan diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sesuai Peraturan Bupati Nomortentang SOTK Dinas PUPR sehingga penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) dan Rencana Detai Tata Ruang Kawasan/Kecamatan (RDTRK) lebih komprehensif.

Tabel 3.9. Sasaran dan Indikator Kinerja Program serta Indikator Kinerja Kegiatan Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala 2017-2022.

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Nama Kegiatan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja	1. Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati	1. Jumlah dokumen RKPD yang disusun	1. Penyusunan Rancangan RKPD 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3. Penetapan RKPD
		2. Nilai SAKIP SKPD Sosbud yang dicapai dari unsur perencanaan kinerja	1. Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang Sosial Pemerintahan yang Selaras 2. Jumlah Renstra/Renja Sub Bidang SDM dan Budaya yang Selaras 3. Jumlah SKPD Bidang Sosbud dengan capaian kinerja sesuai Target	4. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya 5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bid. Sosbud 6. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan 7. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan 8. Penyusunan

				Buku IPM 9. Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 10. Perencanaan Pembangunan Bidang Pamsimas
		3. Nilai SAKIP SKPD Ekofispra yang dicapai dari unsur perencanaan kinerja	4. Jumlah Dokumen RENSTRA/ RENJA SKPD Sub Bidang Ekonomi yang Selaras 5. Jumlah Dokumen RENSTRA/ RENJA SKPD Sub Bidang Fisik Prasarana Yang Selaras 6. Jumlah SKPD Bidang Ekofispra dengan capaian kinerja sesuai target	11. perencanaan pembangunan bidang ekonomi 12. perencanaan pembangunan bidang ekonomi (IPDMIP) 13. Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana
		4. Persentase Hasil Kajian yang diimplementasikan	1. Jumlah kajian yang disusun 2. Jumlah kajian yang diseminasikan	14. Identifikasi Permasalahan Pembangunan 15. Pengembangan dan Diseminasi Bidang Ekofispra dan sosbud 16. Koordinasi Kerjasama Litbang Daerah
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	5. Persentase penerbitan rekomendasi tata ruang	1. Rekomendasi Tata Ruang	17. Revisi Rencana tata Ruang

Capaian Indikator Sasaran 1 sesuai tabel 3.10 tersebut, tidak dapat dibandingkan dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru sesuai Renstra Bappelitbang Tahun 2017-2022 (hasil reuiu). "Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja" didukung oleh 16 kegiatan.

C. Akuntabilitas Keuangan

Selama Tahun Anggaran 2019 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bappelitbang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 7.360.362.600,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 6.760.599.431,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,85 %.

Komposisi belanja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.10. Komposisi Belanja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Belanja Langsung	4.923.901.400,00	4.585.676.105,00	93,13
2	Belanja Tidak Langsung	2.436.461.200,00	2.174.923.326,00	89,27
Jumlah		7.360.362.600,00	6.760.599.431,00	91,85

Sumber: Bappelitbang Kab. Batola.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 93,13 % terhadap realisasi belanja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019, dan sisanya sebesar 89,27 % disumbangkan belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan).

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Renstra Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 3.348.774.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.089.157.954,00 atau 92,25 %, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11. Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	3.348.774.400,00	3.089.157.954,00	92,25

Sumber : Bappelitbang Kab. Batola.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.12. Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Capaian Kinerja Sasaran (rata-rata)	Anggaran	
				Realisasi	%
1	Meningkatkan kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	2	99,64	3.089.157.954,00	92,25

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2019 dapat dikatakan efektif/~~kurang efektif~~/~~tidak efektif~~ terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala.

Analisa Efisiensi

Efisiensi anggaran dalam pencapaian sasaran kinerja rata-rata sebesar 99,64 %, dibandingkan dengan Tabel. 3.1. maka pencapaian kinerja sebesar 99,64 termasuk pada Kriteria **Sangat Baik**. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip

pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.13. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Pada Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018

No	Sasaran	Jumlah Indikator	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	2	99,64	92,25	7,75
	Jumlah	2	99,64	92,25	7,75

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di Bappelitbang pada Tahun Anggaran 2019 yang merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbang Tahun 2017-2022. Keberhasilan dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak internal maupun eksternal Bappelitbang, dan diharapkan hal ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sementara target yang belum tercapai, kedepan harus diantisipasi dan dipacu agar target dapat tercapai bahkan dapat terlampaui.

Hasil Laporan Kinerja Bappelitbang Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari analisis Sasaran Perangkat Daerah (Bappelitbang) "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah", dengan indikator pertama "Nilai SAKIP SKPD yang dicapai dari Unsur Perencanaan Kinerja", realisasi kinerja Bappelitbang Tahun 2019 adalah 99,27 % (23,13 % dari 23,30 %). Kemudian indikator kedua "Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW", realisasi kinerjanya 100 % (95 rekomendasi dari 95 rekomendasi usulan).
2. Realisasi kinerja Bappelitbang 99,64 % masuk pada interval nilai kinerja $91 \leq 100$ dan masuk pada kriteria penilaian realisasi kinerja **Sangat Baik**, dengan Tingkat Efisiensi sebesar 7,75 %.
3. Secara umum pencapaian target tidak menghadapi kendala yang signifikan, meskipun demikian masih terdapat dalam Dokumen Perencanaan Renja SKPD mitra yang belum sama persis dengan outline, tidak sinkron antar Dokumen Perencanaan dan disamping itu juga dari aspek redaksional penulisan dokumen ada juga yang perlu dikoreksi. Kemudian dari aspek eksternal masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat peningkatan kinerja, seperti kompleksitas penyusunan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan regulasi perencanaan dari pemerintah pusat (penerapan e-planning yang akan terintegrasi dengan e-budgetting), dan instrumen monitoring dan evaluasi pembangunan yang masih bersifat kualitatif dan belum ada aplikasi yang terpadu.

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Tindak Lanjut sebagai berikut :

1. Melakukan analisis perencanaan dan penganggaran pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), data yang diambil dari pelaksanaan anggaran SKPD

selama 5 (lima) tahun kebelakang, dilakukan revid untuk penajaman Program Kegiatan agar berkontribusi terhadap sasaran SKPD.

2. Melakukan pengendalian pelaksanaan Program Kegiatan yang lebih berkualitas dan tepat waktu, melalui penggunaan aplikasi yang terpadu.